KONTRIBUSI WAKAF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Oleh
Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: suaidi@untirta.ac.id

Abstract

Waqf as a type of worship related to property aims for social purposes. According to Islamic law, the qualifications of a person's good or bad depend on his concern for others, the higher the concern for others, the higher the level of *iman* (believe). As stated by Allah in the holy Quran: You will never achieve righteousness until you donate some of what you cherish. And whatever you give is certainly well known to Allah. (Q.S. Ali-Imran: 92).

However, many *muslims* still live in poverty in various aspects, inability to fulfill daily needs and the need for a decent place to live, where many Muslims are still homeless living under bridges and some even use sidewalks as a place to live, a place to rest after a long day of begging. This phenomenon is actually a concern of Muslims in an effort to overcome poverty by realizing Islamic law which is oriented to poverty alleviation. Among them is the waqf system which has legal force in accordance with Law No. 41 of 2004, that waqf is a legal act to give some of our property to be used forever or for a certain period of time according to his interests for the purposes of worship and/or general welfare according to sharia. Thus, if waqf is carried out properly, it will be able to improve people's welfare and overcome poverty.

Keywords: Waqf, Welfare and Poverty.

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya tidak memiliki kemampuan untuk berkembang secara individu melainkan selalu bergantung dengan manusia lainnya (Soerjono: 1987). Sebagai manusia, tentunya tidak ada yang sempurna, ketidak sempurnaan inilah yang menyebabkan manusia memiliki naluri untuk saling tolong menolong. Dengan saling memberikan pertolongan antar manusia akan terbina hubungan sesama, antar kelompok, antar masyarakat dan antar bangsa. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya...*Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal (Q.S. Al-Hujrat:13)*. Dari keterangan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa, perbedaan jenis, suku dan dialek bahasa antar manusia (individu) agar dapat dijadikan suatu jembatan penghubung

komunikasi untuk saling memiliki kepedulian sosial.

Mengingat kebutuhan dan perkembangan penduduk sangat kompleks, sementara obyek kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia dipaksa untuk selalu berpacu antar individu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Akibat adanya tuntutan tersebut terkadang manusia tidak segan-segan mendesak berbuat jahat terhadap pihak yang dianggap merintanginya suatu kebutuhan. Problematikan dalam kehidupan sosial akan memberikan konsekwensi yang sangat pelik, ialah adanya jurang pemisah antara orang yang nilai ekonomi lemah dengan orang yang nilai ekonominya tinggi. Jurang pemisah antar manusia yang disebabkan oleh status ekonomi sama sekali dalam Islam tidak dikehendaki. Maka, Islam mensyariatkan membayar zakat, berwakaf, dan amal jariah lainnya yang diorientasikan untuk melindungi kemanusiaan dari kemiskinan dan kesengsaraan. Dan, Islam

tidak menghendaki kemiskinan sebab kemiskinan itu lebih dekat dengan kekufuran dan kekufuran itu lebih dekat dengan kejahatan (Sayyid Qutub: 1984). Namun demikian, realitas tidak bisa dipungkiri, dimana kemiskinan selalu menunjukkan peningkatan yang berdampak kepada semakin buruknya hubungan sosial kemasyarakatan.

Islam tidak pernah menganggap hina terhadap kemiskinan walaupun hal itu cenderung mengakibatkan timbulnya efek yang buruk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagai sistem penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh Islam ialah diwajibkan ummat manusia untuk bekerja keras, bahkan bekerja diutamakan ketimbang beribadah ritual (Zainal Abidin: 1979). Islam memberantas penyakit dan bahaya kemelaratan dengan membangunkan hati dan kekuatan undang-undang negara dan kerja dijadikan skala prioritas dalam kehidupan (Zainal Abidin: 1979). Kemiskinan dan kejahatan merupakan dua hal yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang memiliki konsekuensi yang sama negatifnya terhadap kehidupan sosial. Kejahatan ialah suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat (Soejono: 1985). Dan, menyebab timbulnya kejahatan diantaranya karena lemahnya faktor ekonomi (hidup miskin) (Bonger:1982).

Melihat problematika sebab akibat antara kemiskinan yang berdampak kepada timbulnya kejahatan, Islam menjamin kebutuhan manusia melalui perintah terhadap orang yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk menjamin kebutuhan ekonomi lemah (Suparman: 1987). Semetara Amer Ali dalam kutipan Suparman (1987) menjelaskan, bahwa hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam, sebab ia memiliki kemashlahatan ganda yaitu ibadah kepada Allah, SWT dan memiliki nilai ekonomi yang bertujuan untuk menanggulangi

kemiskinan. Hal ini juga terungkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 bahwa perwakafan merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa harta yang difungsikan sebagai harta wakaf akan berubah menjadi jaminan atas keterlantaran kehidupan manusia secara umum.

Azwar Anas (2017) menjelaskan bahwa Indonesia sendiri dalam penggunaan wakaf masih cenderung jauh dari perhatian masyarakat dan hanya identik dengan masjid, tempat pemakaman, sekolah, pondok pesantren, dan fasilitas lainnya. Sedangkan wakaf yang diperuntukkan dalam hal peningkatan kesejahteraan umat di bidang ekonomi masih sangat minim sehingga dapat dikatakan wakaf di Indonesia bersifat konsumtif, bukan produktif (Depag RI, 2004). Munculnya paradigma wakaf produktif menjadikan sebuah momentum suatu upaya perubahan dari pengelolaan wakaf produktif yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional dalam meningkatkan pemanfaatan wakaf (Mubarok, 2008:16).

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan untuk pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf di bidang ekonomi. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir serta asas transformasi serta tanggung jawab (Mubarok, 2008:35- 36). Wakaf dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harga kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya telah diatur oleh pemerintah

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu antara lain disebutkan dalam Dahwan (2008:73) bahwa: Peruntukkan benda wakaf tidak semata-mata untuk sarana kepentingan ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah” Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf bisa diorientasikan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan catatan tidak menyimpang dari aturan syariat Islam dan perundang-undangan tentang wakaf (UU No: 41/2004).

LANDASAN TEORI

1. Wakaf

Pengertian Wakaf apabila dilihat dari bahasa berasal dari kata “Wakofa, Yakifu, Wakfan” berarti “Menahan, Berhenti atau Diam di Tempat atau Tetap Berdiri” (Suparman:1987). Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq (1983) Wakaf ialah menahan asal dan menafakahkan buahnya (hasilnya) yakni menahan benda (harta) dan menyalurkannya (menggunakan manfaatnya) untuk sabilillah. Menurut Imam Suhadi (1985) Wakaf ialah; pemisahan suatu harta benda seseorang yang disyahkan dan benda itu ditarik dari milik perorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebajikan yang di ridloi Allah, SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi, atau dilenyapkan. Menurut Hasbullah (1988) Wakaf ialah menghentikan manfaat keuntungan untuk amal kebaikan, misalnya tanah kebun diwakafkan untuk sekolah atau untuk kuburan. Menurut Sulaiman Rasyid (1954) Wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, mungkin diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Menurut Mohammad Daud dalam

kutipan Leiden (1988) Wakaf ialah memelihara barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik ketiga. Baranbg yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh orang yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan dan ditetapkan oleh ajaran Islam. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy (1970) wakaf ialah suatu ibadat yang disyariatkan dan telah lazim (telah berlaku) dengan sebuah lafadz walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang miliknya walaupun barang itu tetap ada ditangannya.

Dari definisi wakaf yang dikemukakan oleh para ahli itu pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, melainkan kesemuanya bermuara kepada penglepasan hak milik perseorangan menjadi milik umum dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, wakaf berarti juga sebagai perbuatan seseorang untuk melepaskan (memisahkan) hak miliknya dengan penuh keikhlasan hati untuk dimanfaatkan di jalan Allah, SWT, atau untuk kepentingan umum. Penglepasan hak milik, berarti manfaat barang (benda/harta) yang diwakafkan harus dikembalikan kepada kepentingan umum, sedangkan zatnya tetap utuh/tidak boleh berubah baik mengurangi maupun dipindahkan kepemilikannya.

2. Kemiskinan.

Pengertian kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1989) Kemiskinan ialah suatu standar tingkat hidup yang rendah. Sedangkan menurut Noerdin (1989) Kemiskinan ialah orang yang kurang materi. Menurut Zainal Abidin (1979) Kemiskinan ialah orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “Kemiskinan” ialah kehidupan seseorang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi dari hasil kerja kerasnya. Namun demikian Noerdin (1989) mencoba mengadakan analisis tentang “Kemiskinan” dan ia berkesimpulan bahwa

“Kemiskinan” itu terbagi kepada tiga macam yaitu (1) Kemiskinan ekonomi. (2) Kemiskinan sosial dan (3) Kemiskinan spritual. Sejalan dengan pemikiran ini, maka dapat ditarik suatu pengertian, bahwa kemiskinan bukan berarti khusus bagi orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokonya, melainkan orang yang berpola hidup antipati terhadap spiritual juga dapat digolongkan sebagai orang miskin. Akan tetapi, secara realitas pendapat tersebut kurang tepat sebab untuk kelangsungan hidup individu pada prinsipnya harus diawali dari terpenuhinya kebutuhan di bidang materi. Oleh karenanya, kekurangan dalam bidang materilah yang disebut dengan kemiskinan.

Dyah dan Lailatul Fitriani (2022) menjelaskan bahwa “Kemiskinan” suatu ketimpangan sosial dalam hal kekayaan menjadi masalah yang sering dihadapi oleh seluruh negara, dan kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu;

Kemiskinan absolut, hal tersebut dapat diidentifikasi pada berapa banyak penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan relatif, dilihat dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Artinya, kemiskinan relatif memiliki keterkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Islam memandang bahwa orang yang tergolong miskin ialah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal materi. Akan tetapi Islam tidak membenarkan bahwa orang miskin itu meminta-minta atau selalu minta balas kesian orang lain, sebagaimana Allah berfirman yang artinya. *Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh (jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafakahkan (di jalan Allah) maka*

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Departemen Agama: 1986).

Ayat ini menjelaskan bahwa semiskin apapun seseorang dilarang untuk memintaminta, sebab Islam adalah agama yang peduli terhadap pola kehidupan miskin.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Untuk meneliti terkait dengan kontribusi wakaf dalam menanggulangi kemiskinan digunakan metode penelitian sebagai berikut;

Bentuk penelitian

Bentuk penelitan yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dihubungkan dengan kondisi masa kini (Winarno: 1981)

Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang menjadi obyek peneltian, digunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library reaseach).

Pengolahan data

Dalam mengolah data digunakan teknik pengeolahan data kualitatif, didasarkan kepada jalan pikiran deduktif logik (Sutrisno Hadi: 1986)

Langkah-langkah Penelitian

Mengumpulkan refrensi (buku/bahan kepustakaan) yang ada kaitannya dengan obyek penelitian dalam jurnal ini, kemudian di analisa dengan menggunakan teknik tersebut di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf dan Harta

Wakaf merupakan salah satu sistem pengendalian harta yang dimanifestasikan untuk kepentingan sosial. Wakaf juga merupakan realisasi dari dorongan hukum Islam agar setiap manusia menginfakan harta untuk kepentingan sosial (Mahmud Bably: 1989). Memiliki harta bukanlah tujuan pokok dalam kehidupan, ia hanya merupakan suatu alat untuk mengisi suatu keperluan hidup (Malik Ahmad: 1987). Oleh karenanya, Islam

tidak membenarkan memiliki dan mengendalikan harta sewenang-wenang.

Pandangan hukum Islam terhadap potensi harta tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

... *Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Q.S. Annisa:5)*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

... *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.(Q.S. Al-Jumu'ah:10)*

Fakta yang ditunjukkan oleh firman-Nya tersebut menunjukkan bahwa harta dan proses pencariannya memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia. Karenanya, setiap individu diwajibkan untuk memperolehnya dengan cara kerja keras. Akan tetapi, Islam memberikan rambu-rambu agar memperoleh harta tidak boleh menabrak aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustafa al-Siba'i (1987) bahwa setiap manusia tidak boleh memperoleh harta dengan cara (1) Curang, maka Islam melarang untuk melakukan penipuan waktu berjual beli seperti larangan menyembunyikan cacad barang yang hendak dijual prinsip transparansi harus diutamakan (2) Aniaya, Islam melarang perbuatan riba, perjudian, penimbunan barang, perampasan, pencurian. Karena perbuatan tersebut menyebabkan ada pihak yang teraniaya (3) Berbahaya, Islam melarang memperjual belikan barang yang mengandung bahaya baik terhadap pribadi maupun sistem pemerintahan seperti menjual belikan

minuman keras, narkoba dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan yang ketat untuk memperoleh harta, kemudian setelah memperolehnya Islam juga memberikan rambu-rambu untuk membelanjakannya, sebagaimana diatur dalam firman Allah, SWT;

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

.. *Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar. (Q.S: Alhadid:7).*

Memang, telah diakui kebenarannya, bahwa pola hidup yang tidak disertai dengan harta akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap perkembangan pribadi maupun masyarakat. Islam mengakui dan menghormati kekayaan individu karena kekayaan itu hak yang diperoleh manusia sesuai dengan fitrahnya, Islam tidak menentang dan menghalangi suatu hal yang telah menjadi pembawaan atau fitrah manusia (Salim Bahraisy: 1982). Karenanya, harta sebagai energi yang kuat untuk mengembangkan potensi manusia untuk memperoleh cita-cita puncaknya yaitu tercapainya suatu kebahagiaan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Pengendalian harta hukumnya wajib, maka oleh sebab itulah bagi pemilik harta terikat oleh dua hukum yaitu hak dan kewajiban. Kaitan dengan hak dan kewajiban bagi pemilik harta dikemukakan oleh Salim Bahraisy (1982) sebagai berikut;

Hak milik sendiri

Pemilik mempunyai hak penuh pada harta miliknya, maka ia harus menafakahkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (isteri dan anak-anak)

Hak milik orang lain

Hak milik orang lain pada harta seseorang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya;

Hak orang yang ditentukan golongannya sebagai penerima zakat, sebagaimana firman Allah, SWT;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

... *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*

﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

... *Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (Q.S. Az-Zariyat: 19)*

Termasuk hak orang lain pada harta milik seseorang ialah hak saudara-saudara, hak kawan-kawan, hak tetangga dan hak tamu yang datang, yang kesemunya itu memerlukan pelayanan, sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan adat istiadat yang baik.

Hak milik negara dan bangsa

Negara memiliki hak pada harta milik warganya dengan jalan mewajibkan mereka untuk mengambil bagian dalam pembelanjaan negara, yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran tanah air.

Untuk menanamkan kepedulian sosial bagi yang memiliki harta harus diawali dengan pembinaan mental sebab betapa banyak orang yang memiliki harta akan tetapi lemah dalam sifat empati sosialnya sehingga hal inilah yang menjadi penyebab utama adanya jurang

pemisah antara pemilik harta dengan orang miskin. Islam mengajarkan bahwa pembinaan mental agar setiap individu memiliki kepedulian sosial harus diawali dari pembinaan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dan pertama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Maka, bila keluarga terdidik mentalnya dengan baik akan melahirkan masyarakat yang baik, demikian sebaliknya.

Omar Mohammad (1979) dalam menyikapi existensi keluarga maka keluarga harus dibanbun atas kebenaran, keadilan, kasih sayang, tolong menolong, dan saling menghormati satu sama liannya. Kondisi rumah tangga yang baik akan membuahkan/melahirkan anak-anak yang baik. Dalam kaitannya dengan pembinaan mental keluarga Zakiah Daradjat (1982) berpendapat agar keluarga terbangun sebagaimana yang docontohkan oleh Luqman yaitu;

- 1) Menanamkan jiwa tauhid pada anak-anak
- 2) Menghargai dan menghormati orang tua
- 3) Memelihara dan memperlakukan orang tua dengan baik
- 4) Kejujuran, bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyikan kepada Tuhan walaupun dalam batu kebun
- 5) Supaya mendirikan sembahyang (ibadah)
- 6) Mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan munkar
- 7) Supaya bersabar
- 8) Melarang keangkuhan dan kesombongan
- 9) Sederhana dalam sikap, berjalan, dan berbicara.

Lingkungan keluarga merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan masyarakat yang baik, jika dalam suatu lingkungan masyarakat sudah terdapat celah yang menunjukkan ekses-ekses negatif, seperti; adanya jurang pemisah antara sikaya dengan si miskin, maka anggota masyarakat yang laiannya harus segera ber-inisiatif untuk memperbaikinya, sebab Allah, SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya atau

memperbaikinya (Q.S. Al-Ra'du:11). Memang harus diakui, bahwa pengaruh harta terhadap jiwa seseorang sangat besar sekali. Maka, perlunya pembinaan, agar eksese negatif pengaruh harta tidak mengkristal pada pribadi, sehingga pada gilirannya mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara sikaya dan simiskin.

Manusia memiliki dasar tabiat sangat menyintai harta sebab harta merupakan satu-satunya sarana untuk mencapai kenikmatan dan kesenangan. Bahkan cinta kepada harta yang berlebihan menyebabkan seseorang buta dan tuli terhadap ketentuan dan aturan serta batas-batas moral yang harus ditaati sesuai dengan ajaran agamanya, Hal ini dapat diperhatikandalam firman-Nya;

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

... dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.(Q.S. Al-Fajr:20)

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

... Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan Q.S. Al-'Adiyat:8)

Fakta tersebut dapat dijadikan suatu acuan dasar, bahwa manusia pada dasarnya selalu cenderung untuk menumpuk harta kekayaan dan mementingkan diri sendiri. Dalam kaitannya dengan kehartaan. Islam tetap melindungi hak milik pribadi apabila didapatkannya dengan cara-cara yang sesuai aturan syariat Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Toumy Al-Sayibany (1979) sebagai berikut;

- 1) Hak milik didapatkan dari yang halal, dan keuntungannya juga halal, bukan dari rampasan, atau penipuan, pemerasan dan cara lain yang diharamkan.
- 2) Pengeluaran harta dengan cara yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Tidak karena maksiat, bermewah-mewahan atau menyakiti orang lain
- 3) Tidak menimbun karena Islam mengharamkan menimbun harta. Harta adalah milik Allah, SWT, dan menyalurkanannya agar berorientasi untuk

kepentingan sosial sesuai petunjuk Allah, SWT.

- 4) Penunaian nafakah dari harta itu berdasarkan tahapan hak dan tuntutan, prioritasnya untuk diri sendiri, kemudian untuk kepentingan masyarakat yang dimulai dari kerabat terdekat
- 5) Harta hendaknya diperoleh dari hasil jerih payah pribadi dengan cara bekerja.

Dengan uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa kedudukan harta akan melahirkan suatu kebahagiaan bila digunakan untuk kepentingan sosial setelah terpenuhi kebutuhan pribadi. Dengan artian bahwa orang yang dianugerahi harta jangan sampai melupakan saudara, tetangganya yang miskin.

Relevansi harta wakaf dengan kehidupan sosial

Qordawi (1987) mengemukakan pendapatnya bahwa sejalan dengan semakin kompleksnya perkembangan penduduk, maka tidak akan menuntup kemungkinan bermuncunnya pola hidup yang tidak marata. Maka dalam masyarakat manapun selalu akan ditemukan dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang selalu dalam keadaan kekuarangan. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa pola kehidupan sosial dalam suatu masyarakat terdiri dari dua golongan.

Kemiskinan suatu hal yang selalu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Karenanya, semua pemeluk agama agar mencurahkan perhatiannya kepada masalah kemiskinan dan kemelaratan. Misalnya dapat dilihat beberapa contoh perhatian agama terhadap kemiskinan.

Dalam Taurat surat asmal, pasal 21 ditemukan "*Barangsiapa menyumbat telinga akan tangis orang-orang miskin maka iapun akan berteriak, tetapi tiada yang mendengarkan suaranya*" Dalam Injil Lukas pasal 13 ayat (33) juga terdapat seruan "*Juallah harta dan bersedekahlah*". Pada dasarnya semua agama sangat penuh perhatiannya untuk melindungi kemiskinan dan kesengsaraan. Masyarakat diwajibkan untuk memberikan hak kepada orang yang

mebutuhkan pertolongan. Sitanggal (1984) berpendapat kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi tanggung jawab orang kaya juga tanggung jawab negara.

Kewajiban menggunakan harta dan ketidakbolehan menimbun harta, adalah ciri khas sistem perekonomian Islam. Salah satu bentuk penggunaan harta dalam ajaran Islam yang digunakan untuk kepentingan umum/sosial adalah *wakaf*, karena *wakaf* merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan sosial.

Salah satu bentuk manfaat harta wakaf ketika ‘Umar bin Khotob memperoleh tanah Khaibar, maka Nabi bersabda kepadanya **“Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya, maka ‘Umar bin Khotob bersedekah dengannya tanpa menjual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan (Lihat Dasar Hukum Wakaf;22)**

Pengaruh dan manfaat yang diambil dari amalan wakaf ialah bentuk perbuatan yang memberikan motivasi kepada manusia untuk memiliki sifat pemberi, pemurah, dan saling kasih sayang. Bahkan kebaktian seseorang terhadap Tuhannya belum dianggap sempurna bila dia belum mendermakan harta yang dia cintai itulah yang dinamakan amalan wakaf (Q.S. Ali-Imran:92). Nasib orang miskin tergantung kepada orang kaya, bila orang kaya memiliki kepedulian sosial yang tinggi sesuai dengan ajaran agamanya, maka terpenuhilah kebutuhan orang miskin. Salah satu bentuk amalan untuk menjawab agar kemiskinan tidak berkembang maka *wakaf* harus menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

Masyarakat yang normal ialah masyarakat yang mampu memenuhi harapan-harapan individu sebagai anggotanya, misalnya dalam suatu masyarakat yang masih sederhana susunannya, untuk merencanakan sesuatu mereka harus menggunakan tenaga fisik sebagai modal yang mereka miliki, karena tenaga fisik ialah kekuatan dan atau

kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan kerja (Nyoman Beratha:1982). Setiap individu tentunya memiliki potensi kerja untuk menjamin kebutuhannya, akan tetapi karena adanya jurang pemisah komunikasi antar anggota masyarakat sehingga tidak terbangun harmonisasi antar anggota masyarakat. Akibat sekat komunikasi antar anggota masyarakat maka kepedulian sosial pun akan terhambat, sehingga membuka jalan terbangunnya kehidupan individualislistis dan tebukanya jurang pemisah antara si kaya dan simiskin.

Hikmah yang dapat diambil dari amalan *wakaf*, ialah membentuk mental manusia menjadi arif dan dermawan termasuk menanamkan pola hidup sederhana. Sebagaimana firman-Nya;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

. Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.(Q.S. Al-Furqon:67)

Pada ayat tersebut diungkapkan tiga sikap mental orang yang dikasihi oleh Allah, SWT yaitu; (1) Orang yang tidak berlebihan (mewah) dalam mengeluarkan belanja (2) Orang yang tidak terlalu kikir (3) Orang yang selalu bersifat pertengahan (seimbang) dalam membelanjakan hartanya. Dengan demikian, orang yang selalu terketuk hatinya untuk mengorbankan hartanya dalam bentuk *wakaf* akan membrikan suatu hikmah yang besar terhafap kehidupan sosial kemasyarakatan, hilangnya ekses negatif yang ditimbulkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta.

Termasuk orang yang telah berani mengorbankan hartanya dalam bentuk *wakaf* tidak bisa dilakukan oleh semua orang, sebab memerlukan latihan mental berjiwa dermawan itu sangat sulit dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang kadar keimanannya tidak kuat kepada Tuhan. Oleh karenanya, bahwa orang yang mewakafkan hartanya berarti dia memiliki iman yang kuat dan memiliki

kepedulian sosial yang tinggi dan memiliki jiwa kemanusiaan yang sempurna.

Sistem perwakafan dalam menanggulangi kemiskinan

Islam memberikan panduan terhadap hubungan manusia dengan harta benda, hubungan tersebut dikemukakan oleh Harjono (1987) sebagai berikut;

Manusia diberikan hak oleh Tuhan atas benda (harta) tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan hak untuk mengurusinya dan mengambil faedah daripadanya menurut batas-batas tertentu

Hak untuk mengurus harta (benda) diberikan oleh Tuhan dengan imbalan kewajiban mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama di antara mereka

Karena itu, sebagai pengurus milik Allah SWT, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya (mengambil faedahnya) kepada kehendak Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan al-hadist.

Dari ketiga batasan tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa batasan tersebut merupakan sistem ajaran Islam yang membatasi kehendak nafsu manusia agar tidak beranggapan bahwa harta yang dimilikinya merupakan milik mutlak. Hal ini sesuai dengan firman-Nya;

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
أَمْنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

... Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.(Q.S. Al-Hadid:7)

Selanjutnya Harsojo (1987) memberikan rambu pembatasan kepemilikan harta itu meliputi beberapa kriteria sebagai berikut;

Cara mendapatkan hak milik

Cara mendapatkan hak milik yang telah diatur dalam ajaran Islam sebagai berikut;

Sistem pemilikan menurut ajaran Islam harus selaras dengan kehendak Allah (Q.S. Al-Baqoroh: 188)

Tidak boleh mengandung riba (Q. S. Al-Baqoroh: 275)

Penegasan hak milik

Harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah hak milik secara mutlak, melainkan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut;

Fungsi sosial (Q.S. Al-Hasyr:7) (Q.S. Al-Dzariyat:19)

Harta kekayaan harus dilepas ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh orang banyak. Oleh karenanya, menimbun harta suatu perbuatan keji menurut ajaran Islam (Q.S., Al-Taubah: 34)

Harta benda yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya harus segera dibagikan kepada ahli warisnya.

Kewajiban membelanjakan harta

Dalam kaitannya dengan kewajiban membelanjakan harta, Islam telah membentangkan suatu peraturan sebagai berikut;

Penggunaan harta

Dalam penggunaan harta sebaiknya tidak boros, sebab Islam sangat mengancam terhadap orang yang menggunakan harta dengan boros (Q.S. Al-Furqon:67)

Mengadakan bebeapa lembaga sosial sebagai sarana untuk penyaluran harta diantaranya; (1) Zakat, (2) Sedekah dan hibah (3) Kewajiban selain zakat (Anwar:1987).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kehidupan dalam suatu masyarakat terdiri dari berbagai golongan, idealnya antara golongan harus saling menghormati dan menjalin kasih sayang tanpa harus memandang status sosial. Malik Ahmad (1987) membagi golongan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi (1) Golongan miskin (2) Orang sakit (3) Orang buta (4) Orang lumpuh (5) Orang lanjut usia (6) Anak gelandangan (7) Tawanan. Ketujuh

golongan ini sangat erat hubungan dengan kehartaan. Maka Islam telah mewajibkan bagi yang ber-status ekonomi kuat agar memperhatikan ke tujuh golongan dimaksud tanpa harus melihat status agamanya.

Perwakafan yang telah melembaga akan mampu menjawab dan menanggulangi kemiskinan, kebodohan. Hal ini membuktikan bahwa perwakafan juga merupakan salah satu sistem pengelolaan harta yang dimanifestasikan kepada arah pendidikan. Dengan pengelolaan wakaf yang profesional tidak menutup kemungkinan akan membuka lapangan pekerjaan. Zainal Ahmad (1979) menjelaskan bahwa angka kemiskinan tidak bisa dibendung kecuali dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Dan, lapangan pekerjaan bisa diciptakan melalui pengelolaan harta wakaf produktif.

Siti karlimah (2020) mengemukakan pendapatnya bahwa kekayaan wakaf di Indonesia yang begitu banyak. Namun, secara umum pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini masih sangat sedikit wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir dan miskin.

Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan perwakafan adalah munculnya wakaf tunai. Pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi wakaf dengan wakaf tunai. Pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi wakaf dengan uang tunai yang lazim dikenal Sertifikat Wakaf Tunai. Wakaf yang memasuki wilayah system ekonomi dapat dipahami bila disertai kajian kritis mengenai paradigma ekonomi yang kesejatiannya membawa kepada kemaslahatan

(kesejahteraan sosial). Wakaf menjadi jawaban tepat atas kekisruhan paradigma ekonomi. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial. Dengan digelorkan bentuk pengelolaan wakaf yang berpayung dibawah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka persoalan kemiskinan akan mampu diatasi melalui pemberdayaan wakaf produktif.

KESIMPULAN

Problematika kehidupan sosial kemasyarakatan dipicu oleh semakin nampaknya jurang pemisah antara kehidupan kaya dan kehidupan miskin. Kemiskinan selalu akan menimbulkan problem baru dalam kehidupan masyarakat dan keagamaan. Dengan kemiskinan orang akan nekad berbuat kejahatan seperti pencurian dan mebegalan, dengnan kemiskinan juga akan banyak menimbulkan pola keagamaan menjadi berubah, dengan istilah hamper saja kemiskinan ini akan menimbulkan kekufuran. Artinya, dengan kemiskinan akan semakin banyaknya timbul masalah baru.

Lahirnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah memberikan paying hukum bahwa sudah saatnya wakaf dikelola secara profesional, dan bergeser fungsinya bukan hanya sekedar pengelolaan wakaf sarana ibadah seperti masjid dan tanah kuburan, akan tetapi sudah saatnya untuk diarahkan kepada pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi kepada pengelolaan usaha produktif. Islam mengajarkan agar umat manusia untuk memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah dianungi oleh lembaga negara seperti pengelolaan zakat, infak shodakoh hibah dan wakaf. Dalam catatan sejarah perkembangan Islam bahwa lembaga – lembaga tersebut sangat efektif untuk menjawab tantang ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, 1979 *Masalah perwakafan tana milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*

-
- [2] Jalaludin, Aby Bakry, al-Sayuthi Tt
Al-Jami'u Shoghir, Daarul Ihya al-Aroby
- [3] Al-Qardlawi, Yusuf 1982
Maskilatu al-Fakri wa Kaifa 'ala jaha al-Islamy, Bina Ilmu Surabaya
- [4] Departemen Agama, RI 1986 *Al-Ouran dan terjemahnya*. Saraya jaya, Jakarta
- [5] Hadi, Sutrisno. 1986 *Bimbingan Menulis*, UNIV Gajah Mada, Yogyakarta
- [6] Harjono, Anwar. 1986 *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta
- [7] Harsojo. 1984 *Pengantar Antropologi*, Bina Cipta, Bandung
- [8] Mahmud Bably, Muhmmad. 1989 *Kedudukan harta menurut pandangan Islam*, Kalam Mulia, Semarang
- [9] Parsudi, Suparlan. 1989 *kemiskinan di beberapa negara Islam*, Mizan Bandung
- [10] Usman, Suparman. 1987 *Hukum wakaf*, bulan bintang Jakarta
- [11] Yusuf, harjono. 1981 *Unsur-Unsur dinamika Islam*, Intermasa, Jakarta
- [12] W i j a y a, W. 1986 *Manusia Indonesai Individu Keluarga dan Masyarakat*, Presido Jakarta

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN